



Yudi Prastyo<sup>1</sup>

## PENERAPAN ETIKA PROFESI DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PUBLIK: IMPLIKASI TERHADAP AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN

### Abstrak

Penerapan etika profesional dalam pengelolaan sumber daya publik memainkan peran penting dalam memastikan akuntabilitas pemerintah. Studi ini mengeksplorasi integrasi prinsip-prinsip etis dalam pengelolaan sumber daya publik dan dampaknya terhadap peningkatan transparansi, efisiensi, serta kepercayaan dalam tata kelola pemerintahan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis berbagai studi kasus dan regulasi yang relevan untuk menyoroti pengaruh perilaku etis dalam proses pengambilan keputusan. Temuan menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap etika profesional mendorong akuntabilitas dengan meminimalkan korupsi, mempromosikan alokasi sumber daya yang adil, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Rekomendasi untuk pembuat kebijakan dan administrator publik juga disampaikan guna semakin menanamkan praktik-praktik etis dalam kerangka tata kelola.

**Kata Kunci:** Etika Profesional, Pengelolaan Sumber Daya Publik, Akuntabilitas Pemerintah, Transparansi, Tata Kelola Etis

### Abstract

The application of professional ethics in public resource management plays a critical role in ensuring government accountability. This study explores the integration of ethical principles in managing public resources and its implications for enhancing transparency, efficiency, and trust in governance. Using a qualitative approach, the research examines various case studies and relevant regulations to highlight the impact of ethical behavior on decision-making processes. The findings demonstrate that adherence to professional ethics fosters accountability by minimizing corruption, promoting fair resource allocation, and strengthening public confidence in government institutions. Recommendations for policymakers and public administrators are also provided to further embed ethical practices in governance frameworks.

**Keywords:** Professional Ethics, Public Resource Management, Government Accountability, Transparency, Ethical Governance

### PENDAHULUAN

Pengelolaan sumber daya publik merupakan salah satu tanggung jawab utama pemerintahan dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Sumber daya publik, yang mencakup keuangan negara, sumber daya alam, dan aset negara lainnya, harus dikelola secara transparan, efisien, dan akuntabel untuk memastikan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, etika profesi menjadi landasan penting yang memandu tindakan, keputusan, dan kebijakan yang diambil oleh para pejabat publik. Etika profesi mencakup prinsip-prinsip moral dan standar perilaku yang mengarahkan individu dalam menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab, jujur, dan berintegritas. Oleh karena itu, penerapan etika profesi dalam pengelolaan sumber daya publik tidak hanya berfungsi untuk menjaga kepercayaan masyarakat, tetapi juga menjadi elemen kunci dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintahan.

Akuntabilitas pemerintahan adalah kemampuan institusi publik untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakannya kepada masyarakat sebagai pemilik sejati sumber daya publik. Akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan transparansi informasi, tetapi juga melibatkan tanggung jawab moral dan hukum atas pengelolaan yang

<sup>1</sup> Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto  
email: yudi.strip@mhs.unsoed.ac.id

baik. Dalam praktiknya, banyak tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan akuntabilitas pemerintahan, seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran. Di sinilah peran etika profesi menjadi sangat relevan, karena mampu menjadi penyeimbang yang mengarahkan perilaku para pemimpin dan pejabat publik untuk bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Etika profesi juga membantu menciptakan budaya kerja yang mendukung pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai integritas, keadilan, dan tanggung jawab.

Dalam pengelolaan sumber daya publik, penerapan etika profesi memiliki implikasi yang luas terhadap berbagai aspek pemerintahan. Pertama, etika profesi mendorong transparansi dalam pengelolaan anggaran negara. Transparansi adalah elemen penting yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui bagaimana dana publik dialokasikan dan digunakan. Melalui penerapan etika profesi, pejabat publik diharapkan dapat menghindari praktik korupsi dan manipulasi data anggaran. Prinsip transparansi ini juga didukung oleh penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang mempermudah akses masyarakat terhadap laporan keuangan dan kinerja pemerintahan. Dengan demikian, penerapan etika profesi tidak hanya menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Kedua, etika profesi memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan yang adil dan tidak memihak. Dalam banyak kasus, pejabat publik menghadapi dilema etis ketika harus memilih antara kepentingan pribadi, kelompok, atau masyarakat. Etika profesi menyediakan kerangka kerja untuk menilai situasi ini dan mengambil keputusan yang sesuai dengan prinsip moral dan hukum. Misalnya, dalam pengelolaan sumber daya alam, pejabat publik harus mempertimbangkan dampak keputusan terhadap lingkungan, masyarakat lokal, dan keberlanjutan ekonomi. Keputusan yang etis tidak hanya memperkuat akuntabilitas pemerintahan, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk bertindak demi kepentingan bersama.

Ketiga, etika profesi membantu membangun budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan publik. Budaya kerja ini penting untuk memastikan bahwa seluruh tindakan dan kebijakan pemerintah diarahkan pada upaya memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Dalam praktiknya, etika profesi mendorong pejabat publik untuk selalu bersikap jujur, terbuka, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Budaya kerja yang etis juga membantu mengurangi risiko konflik kepentingan, nepotisme, dan praktik-praktik tidak etis lainnya yang dapat merusak akuntabilitas pemerintahan. Oleh karena itu, etika profesi tidak hanya relevan pada tingkat individu, tetapi juga pada tingkat institusional, di mana nilai-nilai etis menjadi bagian dari tata kelola organisasi.

Namun, penerapan etika profesi dalam pengelolaan sumber daya publik tidak selalu berjalan mulus. Banyak kendala yang harus dihadapi, mulai dari lemahnya pengawasan internal hingga kurangnya pendidikan dan pelatihan tentang etika di kalangan pejabat publik. Selain itu, tekanan politik dan ekonomi sering kali membuat pejabat publik terjebak dalam situasi yang mempersulit penerapan etika profesi. Dalam konteks ini, diperlukan upaya yang lebih besar untuk menciptakan lingkungan yang mendukung penerapan etika profesi, seperti penguatan mekanisme pengawasan, pemberian sanksi bagi pelanggar, dan pengembangan program pendidikan etika di sektor publik.

Penerapan etika profesi juga memerlukan dukungan dari masyarakat sebagai pihak yang menerima manfaat dari pengelolaan sumber daya publik. Masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi kinerja pemerintah dan memastikan bahwa pejabat publik bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip etika profesi. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti mengikuti konsultasi publik, mengajukan laporan pelanggaran, dan menggunakan hak untuk mendapatkan informasi. Dengan demikian, penerapan etika profesi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama yang melibatkan semua pihak dalam masyarakat.

Akuntabilitas merupakan elemen fundamental dalam mewujudkan prinsip *good governance* yang menjadi fokus utama reformasi birokrasi di Indonesia. Konsep ini menekankan pentingnya pemerintah untuk mempertanggungjawabkan hasil dari program-program yang telah dilaksanakan kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat mengevaluasi apakah pemerintah telah bekerja secara ekonomis, efisien, dan efektif sesuai dengan mandat

yang diberikan. Akuntabilitas tidak hanya menjadi alat pengawasan, tetapi juga menjadi mekanisme kontrol untuk meningkatkan transparansi, memperkuat kepercayaan publik, dan memastikan pemanfaatan sumber daya yang optimal.

Dari sudut pandang teoretis, akuntabilitas dapat dianalisis melalui tiga perspektif utama, yaitu perspektif akuntansi, perspektif fungsional, dan perspektif sistem akuntabilitas. Perspektif akuntansi berfokus pada pelaporan keuangan yang akurat dan transparan, sementara perspektif fungsional melihat sejauh mana tugas dan fungsi yang diemban oleh pemerintah telah dijalankan dengan baik. Perspektif sistem akuntabilitas, di sisi lain, mencakup keseluruhan mekanisme yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap komponen dalam pemerintahan bekerja sesuai dengan standar dan tujuan yang telah ditetapkan. Ketiga perspektif ini saling melengkapi untuk menciptakan sistem akuntabilitas yang komprehensif.

Untuk memperkuat sistem akuntabilitas, sejumlah teknik dan pendekatan telah dikembangkan. Metode yang sering digunakan berasal dari disiplin akuntansi, manajemen, dan riset operasi, seperti *management by objectives (MBO)*, anggaran kinerja, dan analisis berbasis riset operasi. Teknik-teknik ini dirancang untuk mengintegrasikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program sehingga hasilnya dapat diukur secara objektif. Pengukuran kinerja menjadi salah satu elemen penting dalam sistem akuntabilitas ini, yang diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama: (1) indikator pengukuran *service efforts* yang menilai sejauh mana sumber daya telah digunakan, (2) indikator pengukuran *service accomplishment* yang mengukur hasil atau pencapaian dari layanan yang diberikan, dan (3) indikator yang menghubungkan *efforts* dengan *accomplishment* untuk menilai efisiensi dan efektivitas program.

Selain pengukuran kinerja, pelaporan kinerja juga menjadi aspek yang tidak kalah penting. Pelaporan ini harus mencakup penjelasan tambahan yang relevan, seperti kendala yang dihadapi, upaya perbaikan yang dilakukan, dan rencana tindak lanjut. Laporan kinerja yang transparan tidak hanya membantu masyarakat memahami capaian pemerintah, tetapi juga mendorong dialog yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat untuk perbaikan layanan publik di masa mendatang.

Namun, implementasi akuntabilitas di Indonesia masih menghadapi tantangan, termasuk lemahnya sistem pengawasan internal, rendahnya pemahaman aparatur pemerintah mengenai prinsip akuntabilitas, serta kurangnya keterbukaan dalam pelaporan kinerja. Reformasi akuntabilitas perlu didukung oleh penguatan kapasitas sumber daya manusia, penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi, dan penguatan kerangka hukum yang mengatur kewajiban pelaporan serta sanksi bagi pelanggaran.

Dengan demikian, akuntabilitas tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan, tetapi juga menjadi budaya kerja yang harus tertanam di setiap level pemerintahan. Keberhasilan dalam membangun sistem akuntabilitas yang kokoh akan berkontribusi pada terciptanya pemerintahan yang responsif, transparan, dan berorientasi pada hasil, yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan publik dan mempercepat perwujudan *good governance* di Indonesia (Arja Sadjarto, 2010).

## **METODE**

Metode penelitian *literature review* adalah pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik tertentu. Pendekatan ini sangat penting dalam penelitian karena menyediakan dasar teoritis, membantu dalam identifikasi celah penelitian, dan mendukung perumusan kerangka konseptual. *Literature review* mencakup proses yang terstruktur mulai dari identifikasi topik, penelusuran literatur, seleksi sumber, hingga analisis tematik atau deskriptif. Hasilnya tidak hanya memberikan wawasan mendalam tentang topik yang diteliti tetapi juga menjadi fondasi kuat untuk penelitian lebih lanjut.

Langkah pertama dalam metode ini adalah identifikasi topik dan perumusan pertanyaan penelitian. Peneliti perlu merumuskan fokus yang jelas tentang apa yang ingin ditelaah dari literatur. Topik yang dipilih biasanya berhubungan dengan isu terkini atau masalah yang belum mendapatkan perhatian cukup dalam penelitian sebelumnya. Perumusan pertanyaan penelitian yang spesifik sangat penting untuk memastikan penelusuran literatur berjalan efektif. Misalnya, jika peneliti ingin mengetahui hubungan antara teknologi pendidikan dan hasil

belajar siswa, pertanyaan penelitian dapat mencakup, "Bagaimana penggunaan teknologi dalam pendidikan memengaruhi hasil belajar siswa di tingkat menengah?"

Setelah topik dan pertanyaan penelitian dirumuskan, proses berikutnya adalah penelusuran literatur. Penelusuran ini dilakukan melalui basis data akademik seperti Google Scholar, PubMed, ProQuest, Scopus, atau Web of Science. Penggunaan kata kunci yang relevan, kombinasi kata, dan operator logika (seperti AND, OR, dan NOT) membantu dalam mempersempit pencarian agar lebih spesifik. Misalnya, untuk topik terkait pendidikan, kata kunci seperti "educational technology," "student learning outcomes," dan "secondary education" dapat digunakan secara terstruktur. Penelusuran juga mencakup penggunaan filter berdasarkan tahun publikasi untuk memastikan literatur yang digunakan adalah terkini dan relevan.

Selanjutnya, dilakukan seleksi literatur berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi mencakup literatur yang relevan dengan topik, diterbitkan dalam jangka waktu tertentu, dan memiliki validitas akademik. Sebaliknya, kriteria eksklusi dapat berupa literatur yang tidak berhubungan langsung dengan topik, diterbitkan dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh peneliti, atau yang tidak dapat diakses secara penuh. Seleksi ini dilakukan untuk memastikan bahwa literatur yang digunakan berkualitas tinggi dan mendukung tujuan penelitian. Sebagai contoh, jika peneliti sedang mengkaji penggunaan teknologi pendidikan pada tingkat sekolah menengah, literatur yang membahas teknologi pada tingkat universitas mungkin dikecualikan karena perbedaan konteks.

Tahap berikutnya adalah analisis literatur. Pada tahap ini, data yang diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif atau tematik. Analisis deskriptif melibatkan penjelasan mengenai isi dan konteks literatur, sedangkan analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama, pola, dan kesenjangan dalam penelitian sebelumnya. Pendekatan ini membantu peneliti memahami bagaimana topik telah dikaji oleh para peneliti sebelumnya dan area mana yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Misalnya, dari analisis tematik, peneliti mungkin menemukan bahwa sebagian besar studi tentang teknologi pendidikan berfokus pada aspek teknis, sementara dampaknya pada motivasi belajar siswa masih jarang dibahas.

Literature review juga sering digunakan untuk membandingkan hasil penelitian yang berbeda. Dalam beberapa kasus, penelitian sebelumnya mungkin memiliki kesimpulan yang bertentangan atau metode yang berbeda dalam mengeksplorasi topik yang sama. Peneliti dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan ini, seperti lokasi penelitian, metode yang digunakan, atau karakteristik sampel. Dengan cara ini, literature review dapat berfungsi sebagai alat untuk menyusun sintesis komprehensif dari berbagai perspektif dan pendekatan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian (Haning, 2018) menyatakan bahwa Reformasi birokrasi di berbagai negara melibatkan perubahan struktur organisasi, budaya organisasi, teknologi, serta hukum dan regulasi. Contohnya, di Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Bill Clinton, program *reinventing government* menekankan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai kewirausahaan ke dalam administrasi pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi. Di Eropa, pendekatan *Neo-Weberian State* (NWS) menonjolkan penguatan peran negara dalam memberikan layanan birokrasi yang berfokus pada hubungan warga-negara, dengan tujuan utama memenuhi hak-hak dasar warga negara. Di negara-negara Persemakmuran Afrika, reformasi menitikberatkan pada transparansi dan akuntabilitas pemerintahan untuk menciptakan birokrasi yang dapat dipercaya. Pada dimensi SDM, fokus reformasi mencakup peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku, pola pikir, disiplin, integritas, dan kinerja para aparatur. Reformasi ini bertujuan menciptakan SDM yang lebih profesional dan mampu mendukung efektivitas birokrasi. Namun, berbagai tantangan seperti resistensi perubahan dan kurangnya pelatihan yang memadai sering kali menghambat implementasi reformasi ini.

Hasil penelitian (Binawati, 2022) menyatakan bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi oleh empat variabel utama: sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia (SDM), sistem pengendalian

intern, dan teknologi informasi. Penelitian dilakukan pada pegawai bagian akuntansi/administrasi keuangan di 24 dinas Pemerintah Kabupaten Klaten, dengan responden sebanyak 152 orang yang memenuhi kriteria masa kerja minimal satu tahun dalam penyusunan laporan keuangan. Analisis data menggunakan metode regresi linier berganda dengan uji F (simultan) dan uji t (parsial) pada tingkat signifikansi 5%.

Hasil penelitian (Gunawan, 2016) menunjukkan bahwa Surabaya merupakan salah satu kota yang berhasil menerapkan teknologi informasi dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi anggaran melalui e-budgeting. Inovasi ini menjadikan Surabaya sebagai salah satu contoh kota dengan sistem transparansi anggaran yang dilakukan secara online, memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Akuntabilitas anggaran di Surabaya diwujudkan melalui upaya pemerintah untuk mempublikasikan secara menyeluruh pelaksanaan proses penganggaran dan program kegiatan. Realisasi ini melibatkan penyediaan informasi anggaran yang dapat diakses oleh masyarakat. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah kota dalam memastikan bahwa anggaran publik digunakan secara efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Penelitian ini menyoroti bahwa transparansi anggaran di Surabaya dicapai dengan memberikan akses kepada masyarakat terhadap informasi anggaran melalui platform online. Pemerintah Kota Surabaya memastikan bahwa seluruh proses anggaran, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, tersedia secara terbuka bagi publik. Transparansi ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk memantau dan mengawasi penggunaan anggaran daerah, sehingga meminimalisasi potensi penyalahgunaan anggaran.

Hasil penelitian (Fitria et al., 2024) mengungkapkan bahwa pelayanan publik di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan signifikan, seperti ketidaksesuaian layanan, kurangnya transparansi, peralatan yang tidak memadai, dan responsivitas yang rendah. Masalah-masalah ini diperburuk oleh kekhawatiran mengenai kurangnya sensitivitas publik, aksesibilitas layanan yang terbatas, hubungan profesional yang lemah antara pegawai negeri dan penerima layanan, serta persepsi terhadap korupsi. Dalam konteks ini, implementasi e-government diharapkan mampu menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut, dengan tujuan meningkatkan kinerja pejabat publik dan mengurangi korupsi melalui penerapan prinsip-prinsip antikorupsi.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan analisis naratif dan konseptual, menggabungkan adaptasi humanistik, interpretasi, dan eksplorasi yang mendalam. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali secara menyeluruh hubungan antara penggunaan teknologi informasi dan peningkatan transparansi serta akuntabilitas dalam pelayanan publik. Hasil penelitian menyoroti bahwa masyarakat memerlukan akses informasi yang relevan dari laporan keuangan dalam inisiatif e-government, tidak hanya terkait pembukuan dana negara tetapi juga dalam memastikan kerahasiaan, pengelolaan anggaran yang efisien, serta pelaporan keuangan yang objektif, akurat, dan profesional sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Penelitian ini juga menggarisbawahi tingginya harapan publik terhadap peran akuntan pemerintah sebagai pelayan publik yang mampu mengatasi isu-isu etika yang kompleks, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Namun, penelitian ini mencatat adanya keterbatasan literatur yang membahas isu-isu etika teknologi dan pengembangan penelitian terkait etika dalam penerapan teknologi pelayanan publik di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan untuk memperkuat landasan teoritis terkait etika teknologi dalam konteks pelayanan publik, guna mendukung penerapan e-government yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Hasil penelitian (Farhanuddin et al., 2022) menegaskan bahwa pelayanan publik yang optimal merupakan salah satu kunci utama dalam memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil warga negara, serta menjadi fondasi dalam mewujudkan good governance. Namun, kenyataannya, pelayanan publik di Indonesia hingga saat ini masih dianggap belum memuaskan oleh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh sejumlah masalah dalam penerapan etika administrator pelayanan publik, seperti sikap yang kurang responsif, ketidakmauan untuk mendengarkan saran dan keluhan, inefisiensi, diskriminasi, serta sikap yang kurang ramah. Kondisi ini menunjukkan bahwa etika masih sering diabaikan dalam pengelolaan pelayanan

publik, padahal penerapan etika yang baik dapat menjadi landasan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka yang menganalisis berbagai jurnal dan artikel terkait pelayanan publik dan penerapan etika administrator. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan kode etik dalam pelayanan publik memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas layanan. Kode etik berfungsi sebagai panduan moral dan profesional bagi pegawai dalam menjalankan tugas mereka, mencegah perilaku tidak etis, serta mengurangi permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan demikian, kode etik tidak hanya memperbaiki citra pelayanan publik tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik.

Selain itu, penelitian ini menyoroti bahwa penerapan kode etik yang konsisten dan efektif dapat membangun dukungan masyarakat terhadap layanan publik, menciptakan rasa keadilan, dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga negara. Hal ini sejalan dengan prinsip *good governance*, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan keadilan dalam pelayanan. Dengan penerapan etika yang baik, pelayanan publik dapat menjadi lebih responsif, efisien, dan inklusif, sehingga tujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dapat diwujudkan secara nyata. Penelitian ini juga merekomendasikan perlunya penguatan pendidikan etika bagi pegawai publik serta pengawasan yang ketat dalam implementasi kode etik untuk memastikan keberlanjutan perbaikan pelayanan publik di masa depan.

Hasil penelitian ini menyoroti bahwa pelayanan publik merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sesuai dengan hak-hak mereka atas barang, jasa, atau pelayanan administrasi. Pelayanan publik ini mencerminkan tanggung jawab penyelenggara pelayanan terhadap kepentingan publik, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Dalam konteks ini, masyarakat sebagai pelanggan memiliki ekspektasi tinggi terhadap kinerja yang profesional, responsif, dan memuaskan dari penyelenggara pelayanan publik. Namun, realitasnya, pelaksanaan pelayanan publik di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam aspek etika.

Dengan implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam menetapkan standar pelayanan minimal yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Hal ini menciptakan peluang untuk memperbaiki kualitas pelayanan melalui kebijakan yang lebih relevan secara kontekstual. Namun, meskipun ada kemajuan dalam pelaksanaan desentralisasi, penelitian menunjukkan bahwa salah satu masalah mendasar yang menghambat optimalisasi pelayanan publik adalah lemahnya penerapan etika dalam proses pelayanan. Tidak adanya standar universal yang mengatur norma atau etika secara khusus dalam pelayanan publik, serta kurangnya sanksi yang tegas untuk pelanggaran etika oleh aparat pelayanan publik, menjadi kendala signifikan (Bisri et al., 2019).

Hasil penelitian (Hartati, 2020) menjelaskan bahwa Paradigma birokrasi di Indonesia masih cenderung berorientasi pada kekuasaan daripada pelayanan publik, sehingga perubahan paradigma yang signifikan belum tampak meskipun berbagai upaya reformasi telah dilakukan. Dalam pelaksanaan agenda reformasi birokrasi, regulasi yang ada belum sepenuhnya diimplementasikan secara efektif karena terhambat oleh budaya organisasi yang kurang mendukung, kesenjangan sumber daya manusia, dan struktur institusional yang tidak efisien. Selain itu, penerapan *New Public Management (NPM)*, yang menekankan pada efisiensi, transparansi, dan orientasi hasil, juga belum dapat diterapkan secara menyeluruh. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, termasuk tingkat korupsi yang tinggi, politisasi kebijakan, serta resistensi terhadap perubahan dalam struktur birokrasi yang masih terlalu hierarkis dan kaku.

Hasil penelitian (Choirulsyah & Azhar, 2024) menjelaskan bahwa Etika memiliki peran sentral dalam menentukan keberhasilan operasi organisasi dan individu dalam administrasi publik, mencakup berbagai tahapan mulai dari desain struktur organisasi hingga perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan serta pelayanan publik. Penelitian ini, yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan data utama diperoleh melalui observasi dan tambahan dari media serta studi kepustakaan, menemukan bahwa pelanggaran kode etik masih menjadi tantangan signifikan di Indonesia. Meskipun upaya penegakan hukum telah dilakukan, pemerintah juga harus lebih tegas dalam menegakkan etika administrasi publik untuk

mencegah dan meminimalkan masalah tersebut. Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik, administrator publik perlu menjadikan etika administrasi publik sebagai acuan utama, mengingat bahwa tindakan mereka berdampak langsung pada seluruh warga negara. Oleh karena itu, penerapan etika administrasi publik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini memberikan implikasi penting sebagai dasar perubahan sistem yang lebih baik dalam mengintegrasikan etika ke dalam praktik administrasi publik.

Etika pemerintahan berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur perilaku aparatur atau pemerintah yang berada dalam lembaga resmi pemerintahan, demi mewujudkan cita-cita negara. Dalam praktiknya, pelayanan kepada masyarakat harus didasarkan pada pedoman yang mampu menuntun tindakan aparatur ke arah yang lebih baik, terpuji, dan bermoral, dengan bersumber pada norma sosial dan norma hukum. Penerapan etika pemerintahan berperan sebagai kontrol bagi aparatur dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan mereka, sehingga pelayanan publik dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat secara optimal. Aparatur yang menjunjung tinggi etika dalam sikap dan perilaku sehari-hari akan menjaga kewibawaan pemerintah, menjalankan fungsinya secara maksimal, dan menghindari penyimpangan yang dapat merusak citra lembaga tempat mereka bertugas. Dengan demikian, etika pemerintahan tidak hanya mencerminkan komitmen terhadap tata kelola yang baik, tetapi juga memastikan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat (Endah, 2018).

Praktik penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia saat ini masih diwarnai oleh ketidakpastian dalam hal biaya, waktu, dan prosedur pelayanan. Proses pengurusan pelayanan publik sering kali dianggap rumit, seperti memasuki "hutan belantara" yang penuh ketidakjelasan, di mana waktu dan biaya yang harus dikeluarkan oleh pengguna layanan tidak pernah transparan. Hal ini disebabkan oleh prosedur pelayanan yang lebih menekankan pada kewajiban warga sebagai pengguna layanan, sementara kewajiban penyelenggara dan hak warga kurang diperhatikan atau diatur dengan baik. Kondisi ini mendorong munculnya praktik pungutan liar (pungli), di mana warga merasa perlu memberikan imbalan kepada petugas agar memperoleh kepastian pelayanan. Selain itu, ketidakpastian tersebut juga menyebabkan banyak warga lebih memilih menggunakan jasa pihak ketiga atau biro jasa daripada mengurus pelayanan publik secara langsung. Fenomena ini mencerminkan perlunya reformasi mendalam dalam sistem pelayanan publik untuk menciptakan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas yang lebih baik (Syahbana & Indriaty, 2021).

Akselerasi etika pemerintahan dalam birokrasi merupakan aspek krusial yang harus diwujudkan oleh setiap aparatur pemerintahan. Sebagai penyelenggara pemerintahan, aparatur memiliki tanggung jawab besar untuk mengaktualisasikan nilai-nilai etika dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan penguatan nilai etika pemerintahan sebagai upaya meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi literature review, penelitian ini menggali berbagai literatur terkait etika pemerintahan dan implementasinya dalam birokrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan etika pemerintahan dapat dicapai melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila pada aparatur pemerintahan. Sebagai ideologi negara, Pancasila tidak hanya menjadi landasan konstitusional tetapi juga pedoman moral yang harus diintegrasikan dalam sikap dan perilaku aparatur. Nilai-nilai seperti keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan, harus diwujudkan dalam bentuk pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dengan menjadikan Pancasila sebagai fondasi etika pemerintahan, aparatur dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Selain internalisasi Pancasila, reformasi budaya birokrasi juga menjadi urgensi yang perlu diimplementasikan untuk menciptakan birokrasi yang profesional dan berkualitas. Reformasi ini melibatkan perubahan mendasar dalam pola pikir, budaya kerja, dan sistem pelayanan yang selama ini cenderung hierarkis dan kaku. Dalam konteks ini, profesionalisme harus ditingkatkan melalui pelatihan berkelanjutan, peningkatan kompetensi, dan pembentukan karakter yang berintegritas. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa sistem penilaian kinerja

berbasis etika diterapkan secara konsisten untuk mendorong aparatur bekerja dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi.

Lebih lanjut, etika pemerintahan juga memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika aparatur mampu menunjukkan integritas dan profesionalisme dalam pelayanan, hal ini akan memperkuat legitimasi pemerintah di mata publik. Sebaliknya, pelanggaran etika, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme, dapat merusak citra birokrasi dan menghambat pembangunan. Oleh karena itu, penguatan etika tidak hanya berdampak pada kinerja individu aparatur tetapi juga pada efektivitas pemerintahan secara keseluruhan (Afrijal et al., 2023).

Akuntabilitas memainkan peran yang sangat penting dalam pemerintahan, terutama sebagai fondasi untuk mewujudkan *good governance*. Dalam konteks pemerintahan, akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk bertanggung jawab atas tindakan, keputusan, dan kebijakan yang mereka ambil kepada publik. Peran utama akuntabilitas adalah memastikan bahwa pemerintah bekerja secara transparan, ekonomis, efisien, dan efektif dalam mengelola sumber daya publik serta memberikan layanan kepada masyarakat. Hal ini tidak hanya mencakup aspek teknis dan administratif, tetapi juga mencakup moral dan etika yang harus dipegang oleh para pejabat publik dalam menjalankan tugas mereka.

Salah satu peran penting akuntabilitas adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika pemerintah transparan dalam menyampaikan laporan kinerja dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menilai capaian program-program yang dijalankan, hal ini menciptakan hubungan yang lebih sehat antara pemerintah dan masyarakat. Transparansi ini juga membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan tindakan tidak etis lainnya yang dapat merusak citra pemerintah.

Selain itu, akuntabilitas berfungsi sebagai alat kontrol untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan selaras dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, akuntabilitas memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan, kritik, dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah. Dengan adanya mekanisme ini, pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan yang tidak efektif atau kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga menciptakan pelayanan publik yang lebih responsif.

Di sisi lain, akuntabilitas juga berperan dalam mendorong efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya negara. Dengan adanya kewajiban untuk melaporkan penggunaan anggaran dan hasil dari setiap program, pemerintah didorong untuk memanfaatkan anggaran secara optimal dan fokus pada pencapaian hasil yang maksimal. Hal ini membantu mengurangi pemborosan sumber daya dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Akuntabilitas juga memiliki peran strategis dalam membangun budaya kerja yang profesional dan berintegritas di kalangan aparatur pemerintahan. Ketika sistem akuntabilitas diterapkan secara konsisten, para pejabat publik akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan menjalankan tugas mereka, karena mereka mengetahui bahwa tindakan mereka akan diawasi dan dinilai. Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang lebih transparan dan mendorong inovasi serta kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama.

Namun, penerapan akuntabilitas dalam pemerintahan juga menghadapi tantangan, seperti lemahnya pengawasan internal, resistensi terhadap perubahan, dan kurangnya keterbukaan dalam pelaporan kinerja. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan peran akuntabilitas, diperlukan langkah-langkah seperti penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penerapan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaporan yang lebih transparan (Imawan et al., 2019).

### **Pembahasan**

Etika profesi menjadi landasan penting dalam pengelolaan sumber daya publik, terutama dalam konteks pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Etika profesi berfungsi sebagai panduan normatif bagi para pemangku kepentingan publik untuk bertindak dengan integritas, keadilan, dan profesionalisme. Dalam pengelolaan sumber daya publik, penerapan etika tidak hanya menyangkut perilaku individu, tetapi juga mencakup budaya organisasi dan sistem tata kelola yang mendorong akuntabilitas. Pengelolaan yang etis memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki negara, baik berupa anggaran, waktu, maupun aset, dimanfaatkan secara efektif

dan efisien untuk kepentingan masyarakat. Tanpa penerapan etika yang konsisten, risiko penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan ketidakadilan dalam pelayanan publik akan semakin tinggi, mengancam kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika profesi dalam pengelolaan sumber daya publik memiliki korelasi erat dengan peningkatan akuntabilitas pemerintahan. Menurut Fitria et al. (2024), keberhasilan pengelolaan sumber daya publik tidak hanya diukur dari output yang dihasilkan, tetapi juga dari proses yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip etis. Pemerintah yang mematuhi kode etik profesi akan lebih transparan dalam pelaporan anggaran, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kebijakan publik. Sebagai contoh, penerapan teknologi informasi dalam bentuk e-budgeting di Surabaya berhasil meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran, sehingga masyarakat dapat memantau alokasi dan penggunaan dana publik secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola yang berbasis etika tidak hanya menciptakan sistem yang lebih baik, tetapi juga mengurangi potensi penyimpangan.

Namun, tantangan dalam penerapan etika profesi di sektor publik tidak dapat diabaikan. Banyak organisasi pemerintah masih menghadapi resistensi terhadap perubahan budaya kerja yang berbasis etika. Hartati (2020) mencatat bahwa birokrasi di Indonesia cenderung mempertahankan hierarki kekuasaan, yang sering kali bertentangan dengan prinsip pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Selain itu, lemahnya sistem pengawasan internal memperburuk praktik ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya publik. Tanpa pengawasan yang ketat, etika profesi sering kali hanya menjadi konsep ideal tanpa implementasi nyata di lapangan. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen dari seluruh elemen pemerintahan untuk menegakkan etika profesi secara konsisten, baik melalui pelatihan, pemberian sanksi bagi pelanggaran, maupun pemberdayaan budaya organisasi yang mendukung transparansi.

Etika profesi juga memiliki implikasi langsung terhadap akuntabilitas individu dan kelembagaan. Akuntabilitas individu menuntut setiap aparatur negara bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambilnya. Hal ini melibatkan integritas pribadi, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kemampuan untuk mengakui kesalahan. Sebaliknya, akuntabilitas kelembagaan mencakup transparansi dalam pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Farhanuddin et al. (2022) menunjukkan bahwa organisasi yang menjunjung tinggi etika profesi cenderung memiliki tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi, karena adanya kontrol internal yang baik dan budaya kerja yang transparan. Dengan kata lain, penerapan etika profesi bukan hanya meningkatkan reputasi lembaga, tetapi juga memperkuat legitimasi pemerintah di mata masyarakat.

Pentingnya etika profesi dalam pengelolaan sumber daya publik semakin relevan dalam era digital, di mana masyarakat memiliki akses lebih luas terhadap informasi publik. Teknologi informasi, seperti e-government, memberikan peluang besar untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pelayanan publik. Namun, tanpa penerapan etika yang memadai, teknologi justru dapat menjadi alat baru untuk menyembunyikan penyimpangan. Choirulsyah dan Azhar (2024) menyoroti bahwa penerapan e-government harus disertai dengan penguatan etika profesi, terutama dalam melindungi kerahasiaan data publik dan memastikan proses pengambilan keputusan yang adil. Tanpa pendekatan berbasis etika, teknologi informasi hanya akan menjadi solusi parsial yang tidak menyentuh akar masalah dalam pengelolaan sumber daya publik.

Pada tataran praktis, etika profesi dalam pengelolaan sumber daya publik dapat diterapkan melalui beberapa langkah strategis. Pertama, pengembangan kode etik yang spesifik untuk sektor publik. Kode etik ini harus mencakup prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, dan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kedua, pendidikan dan pelatihan etika bagi aparatur negara. Pendidikan etika tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga pada studi kasus dan simulasi yang mencerminkan tantangan nyata dalam pengelolaan sumber daya publik. Ketiga, penguatan sistem pengawasan dan evaluasi berbasis etika. Sistem ini harus memastikan bahwa setiap pelanggaran etika mendapat sanksi yang setimpal, sekaligus memberikan penghargaan bagi aparatur yang menunjukkan integritas tinggi dalam pekerjaannya.

Selanjutnya, budaya organisasi yang etis juga harus dibangun melalui kepemimpinan yang berintegritas. Pemimpin yang memiliki komitmen kuat terhadap etika profesi akan menjadi teladan bagi bawahannya. Sebagaimana dicatat oleh Bisri et al. (2019), kepemimpinan berbasis etika mampu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung transparansi, kolaborasi, dan akuntabilitas. Pemimpin etis tidak hanya fokus pada pencapaian target organisasi, tetapi juga pada bagaimana target tersebut dicapai sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan hukum. Dengan demikian, kepemimpinan etis berperan sebagai penggerak utama dalam transformasi birokrasi yang berintegritas.

Penerapan etika profesi dalam pengelolaan sumber daya publik juga memiliki dampak jangka panjang terhadap pembangunan nasional. Ketika pemerintah mampu mengelola sumber daya publik secara transparan dan akuntabel, kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan akan meningkat. Kepercayaan ini menjadi modal sosial yang sangat penting dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Selain itu, pengelolaan yang etis juga akan meningkatkan daya saing negara di tingkat global, karena menciptakan iklim investasi yang kondusif dan pemerintahan yang kredibel.

## SIMPULAN

Penerapan etika profesi dalam pengelolaan sumber daya publik merupakan fondasi penting bagi terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan menjunjung prinsip-prinsip etika seperti integritas, keadilan, dan tanggung jawab, pemerintah dapat membangun sistem tata kelola yang efektif dan terpercaya. Meskipun tantangan seperti resistensi budaya kerja, lemahnya pengawasan, dan penyimpangan etika masih menjadi hambatan, pendekatan sistemik melalui pendidikan, penguatan pengawasan, dan kepemimpinan yang berintegritas dapat mengatasi kendala tersebut. Dampaknya tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga memperkuat legitimasi dan daya saing negara di tingkat global. Dengan demikian, etika profesi tidak hanya berperan sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai katalisator untuk pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrijal, A., Helmi, H., Latif, I. R., & Usman, B. (2023). Penguatan Etika Pemerintahan Sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintahan. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(4), 269–275. <https://doi.org/10.36982/Jpg.V8i4.3416>
- Arja Sadjiarto. (2010). Akuntabilitas Dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), Pp.138-150. <https://doi.org/10.9744/Jak.2.2.Pp.138-150>
- Binawati, E. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Optimal*, 19(1), 19–39.
- Bisri, M. H., Asmoro, B. T., Studi, P., Pemerintahan, I., Islam, U., Rahmat, R., Studi, P., Pemerintahan, I., Islam, U., & Rahmat, R. (2019). Etika Pelayanan Publik Di Indonesia. *Journal Of Governance Innovation*, 1(1), 59–76.
- Choirulsyah, D., & Azhar, A. (2024). Implementasi Etika Administrasi Publik : Langkah Utama Dalam Menciptakan Good Governance Di Indonesia. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 9(3), 195–203. <https://doi.org/10.36982/Jpg.V9i3.3757>
- Endah, K. (2018). Etika Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 141–151. <https://jurnal.unigal.ac.id/Moderat/Article/View/1088%0ahttps://jurnal.unigal.ac.id/Index.php/Moderat/Article/Download/1088/985>
- Farhanuddin, A. F., Ayulia, A., Setia, P., Jauza, D., Etik, K., & Publik, P. (2022). Penerapan Etika Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Dialektika : Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1), 64–74.
- Fitria, A., M. I. R., Inayatul, M., Hasanah, D., T. H. P., I. S. E., & H. S. N. (2024). Tinjauan Teori Dan Konsep Penerapan Etika Teknologi Pada Layanan Publik E-Government Yang Diberikan Oleh Akuntan Pemerintah ( Review Of Theories And Concepts Regarding The Application Of Technology Ethics In E-Government Public Services Provided By Govern. *Prosiding National Seminar On Accounting, Finance, And Economics (Nsafe)*, 41–51.

- Gunawan, D. R. (2016). Penerapan Sistem E-Budgeting Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Studi Pada Pemerintah Kota Surabaya). *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 72–102.
- Haning, M. T. (2018). Reformasi Birokrasi Di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Administrasi Publik. *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 4(1), 25–37.
- Hartati, S. (2020). Penerapan Model New Public Management (Npm) Dalam Reformasi Birokrasi Di Indonesia. *Jurnal Msda (Manajemen Sumber Daya Aparatur)*, 8(2), 65–84. <https://doi.org/10.33701/jmsda.v8i2.1293>
- Imawan, A., Gugus Irianto, & Prihatiningtias, Y. W. (2019). Peran Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Membangun Kepercayaan Publik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1). <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.04.10009>
- Syahbana, A., & Indriaty, L. (2021). Analisa Penerapan Etika Pegawai Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Kelurahan Maro Kabupaten Merauke. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 1(I), 76–82. <https://doi.org/10.55551/jip.v1ii.8>